



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GEMA ARTISTI WAHYUDI  
2. Jabatan : KEPALA DINAS  
3. NHK : 739555

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di TEMANGGUNG,  
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 207.000.000

1. MOTOR, HONDA E1FF02N11MZ A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI  
Rp. 17.000.000  
2. MOBIL, TOYOTA B401RA-GQZEJ (CALYA 1.2 G AT) Tahun 2019,  
HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000  
3. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL  
SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 10.000.000

Sub Total Rp. 976.000.000

**III. HUTANG** Rp. 325.800.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 650.200.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DEWI INSAN KAMIL PAMUNGKAS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 760337

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 758.300.000

1. Tanah Seluas 2030 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 422 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 63.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/150 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 307 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 27.600.000

1. MOTOR, HONDA MOTOR BEBEK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.600.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 18.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 81.590**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 803.981.590

**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 803.981.590

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.